

BAB II

GAMBARAN UMUM

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOTA MAGELANG DAN KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Gambaran Umum Kota Magelang

Kota Magelang merupakan salah satu kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah dengan bentuk kota yang melintang dari arah utara hingga arah selatan. Kota Magelang juga menjadi salah satu kota yang mempunyai letak strategis karena wilayahnya yang berada pada jalur lintas yang menghubungkan Kota Semarang sebagai Pusat Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran umum Kota Magelang terdiri dari Kondisi Geografis dan Demografi, Kondisi Sosial Politik dan Kondisi Covid-19 yang akan dijelaskan sebagai berikut,

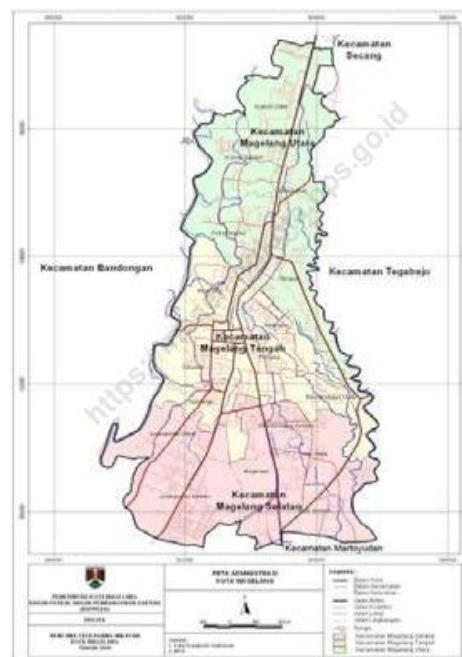
2.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Magelang

a. Kondisi Geografis

Kota Magelang merupakan salah satu Kota yang berada pada daerah administratif Provinsi Jawa Tengah. Letak astronomis Kota Magelang berada pada $110^{\circ}12'30''$ - $110^{\circ}12'52''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}26'28''$ - $7^{\circ}30'9''$ Lintang Selatan. Kota Magelang memiliki luas wilayah sebesar $18,12 \text{ Km}^2$. Dengan luas tersebut, Kota Magelang menjadi wilayah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase luas wilayah sebesar 0,66% dari keseluruhan luas Provinsi Jawa Tengah.

Kota Magelang mempunyai letak geografis yang unik yaitu berada di tengah wilayah Kabupaten Magelang. Kota Magelang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Batas Barat Kota Magelang yaitu Sungai Progo atau Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Batas sebelah Selatan Kota Magelang yaitu Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sebelah Timur, Kota Magelang berbatasan dengan sungai Elo atau Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 2.1 sebagai berikut,

Gambar 2.1
Peta Kota Magelang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Peta di atas menunjukkan letak Kota Magelang beserta batas-batas wilayah yang mengelilingi Kota Magelang. Selain itu, Peta di atas juga menunjukkan bentuk Wilayah Kota Magelang yang melintang dari utara ke selatan.

Kota Magelang memiliki 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan. Pusat Pemerintahan kota Magelang terletak pada Kecamatan Magelang Tengah. Di samping itu, Kota Magelang terdiri atas 17 Kelurahan. Persebaran Wilayah Administratif Kota Magelang akan digambarkan dalam Tabel berikut,

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Kota Magelang

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Kelurahan
1	Magelang Utara	6, 29	5	Wates, Potrobangsari, Kedungsari, Kramat Utara, Kramat Selatan.
2	Magelang Tengah	5, 12	6	Rejowinangun Utara, Kemirirejo, Cacaban, Magelang, Pajang, Gelangan.
3	Magelang Selatan	7, 13	6	Magersari, Rejowinangun Selatan, Jurangombo Utara, Jurangombo Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan

Sumber : Diolah Peneliti dari Data Badan Pusat Statistik Kota Magelang 2021

Tabel di atas menjelaskan mengenai persebaran wilayah administratif Kota Magelang yang meliputi kecamatan, luas wilayah kecamatan, dan kelurahan yang ada di Kota Magelang.

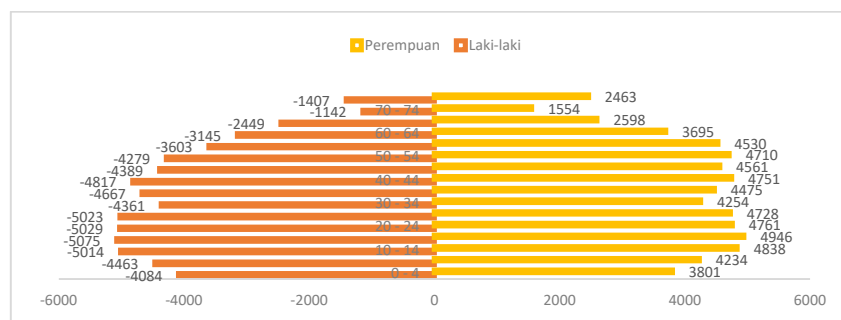
Wilayah Kota Magelang memiliki keanekaragaman penggunaan lahan. Badan Pusat Statistik Kota Magelang (2020:4) memaparkan, penggunaan lahan terluas yaitu digunakan sebagai Lahan atau pekarangan untuk bangunan sebesar 66,6% dari luas wilayah Kota Magelang. Penggunaan lahan untuk Pengairan teknis atau Sawah sebesar 7,71% sedangkan untuk kawasan industri sebesar 2,88%. Penggunaan Lahan tersebut disesuaikan dengan prioritas masyarakat Kota Magelang.

b. Kondisi Demografis Kota Magelang

Kependudukan merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu wilayah. Status Kota Magelang sebagai wilayah Kota menjadikan dinamika Kependudukan yang cenderung kompleks jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Jumlah Penduduk Kota Magelang Tahun 2021 yaitu sebesar 127.846 Jiwa dan terdiri dari penduduk laki laki sejumlah 62.947 Jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 64.899 Jiwa. Komposisi usia penduduk di Kota Magelang dapat dilihat pada Gambar berikut,

Gambar 2.2

Proyeksi Penduduk Per Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2021



Sumber : Diolah peneliti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

Data di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Kota Magelang berupa Piramida Penduduk ekspansif yang dapat dibuktikan dengan adanya jumlah penduduk usia muda yang lebih mendominasi komposisi usia penduduk di Kota Magelang.

Kehidupan Demografi Kota Magelang tidak terlepas dari mata pencaharian masyarakatnya. Badan Pusat Statistik Kota Magelang (2020) meringkas 5 (lima) jenis mata pencaharian masyarakat Kota Magelang diantaranya , 1). Pertanian

sebesar 1,3%; 2). Industri sebesar 17,69%; 3) Sektor perdagangan terdiri dari 27,63%; Penyedia Makan Minum sebesar 12,09%; dan 5). Sektor lainnya sebesar 41,29%. Selain itu, Peningkatan pendapatan perkapita Kota Magelang juga didukung oleh adanya Upah Minimum Kota (UMK) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang penting bagi kualitas sumber daya masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang memiliki berbagai sarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat terdapat 77 Sekolah Dasar, 23 Sekolah Menengah Pertama, 20 Sekolah Menengah Kejuruan dan 15 Sekolah Menengah atas yang tersebar pada kecamatan-kecamatan di Kota Magelang. Selain itu, Kota Magelang juga merupakan kawasan yang terdapat berbagai perguruan tinggi diantaranya, 1). Universitas Tidar; 2). Akademi Kebidanan Magelang; 3). Universitas Muhammadiyah Magelang; 4) Stmik Bina Patria; dan 5). Stikom Magelang. Hal tersebut menunjukkan Kota Magelang mempunyai akses yang luas pada bidang pendidikan.

Pada Kota Magelang terdapat 1,82% penduduk diatas 15 tahun yang tidak dapat membaca dan menulis. Badan Pusat Statistik Kota Magelang mencatat komposisi partisipasi pendidikan masyarakat kota magelang yang berusia diatas 15 tahun yaitu sebanyak 14,65% masyarakat memiliki ijazah SD, 18,88% masyarakat memiliki ijazah SMP dan 60,64% memiliki ijazah SMA maupun Perguruan Tinggi. Di samping itu, terdapat 5,83% penduduk berusia 15 tahun keatas tidak memiliki ijazah. Dengan demikian, kondisi pendidikan di Kota Magelang dapat dikatakan

memiliki potensi yang cukup tinggi dalam mendorong kualitas sumber daya manusia di Kota Magelang.

2.1.2 Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Kota Magelang

Kondisi Sosial-Budaya pada Kota Magelang dapat dikatakan sebagai komposisi yang beragam, hal ini didukung oleh adanya status Kota Magelang sebagai Wilayah Kota yang menjadi tempat bertemunya dinamika sosial-budaya masyarakat. Kondisi Sosial-Budaya terdiri dari Agama dan budaya yang ada pada masyarakat Kota Magelang. Kementerian Agama Kota Magelang mencatat, terdapat 6 (enam) agama yang dianut masyarakat Kota Magelang yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Mayoritas masyarakat Kota Magelang menganut agama islam yaitu sebanyak 109.373 orang. Disamping itu, agama Konghucu menjadi agama yang paling sedikit dianut oleh masyarakat Kota Magelang.

Kondisi budaya kota Magelang tidak terlepas dari sejarah masa lalunya yang merupakan daerah Karesidenan Kedu dan masih termasuk dalam wilayah Kerajaan Mataram Islam. Keberadan sejarah tersebut menjadikan kebudayaan di kota magelang didominasi dengan kebudayaan islam dan kebudayaan jawa. Selain itu, Kota Magelang juga memiliki berbagai peninggalan sejarah dan kebudayaan dari Cina dan Eropa. Dengan demikian, Kota Magelang memiliki kondisi sosial-budaya yang beragam dan kompleks yang dapat dilestarikan oleh masyarakat Kota Magelang.

2.1.3 Kondisi Sosial Politik Kota Magelang

Kota Magelang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dengan dinamika sosial politik yang cukup kompleks. Kondisi sosial politik di kota magelang dapat digambarkan dengan adanya proses-proses demokrasi yang ada di kota magelang. Proses demokrasi yang ada di kota magelang terdiri dari Pemilihan Umum (Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan umum yang telah diselenggarakan di Kota Magelang terdiri dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, sedangkan Pilkada terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan walikota dan wakil walikota.

a. Pemilu

Pemilu Legislatif (Pileg) di Kota Magelang digunakan untuk memilih anggota legislatif di Kota Magelang. Kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di Kota Magelang dapat ditunjukkan melalui tabel berikut,

Tabel 2.2

Partisipasi Pemilu Legislatif Kota Magelang Periode 2004-2019

No	Jenis Pemilu	Partisipasi Pemilihan (%)			
		2004	2009	2014	2019
1	Pemilu Legislatif	85,77	70,99	75,28	86,9

Sumber : diolah peneliti dari KPU Kota Magelang

Tabel diatas menunjukkan adanya fluktuasi partisipasi atau kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pileg Kota Magelang Periode 2004-2009. Persentase tertinggi kehadiran dan penggunaan hak memilih pada pemilu tersebut berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 86,9% sedangkan persentase terendah berada pada tahun 2009 sebesar 70,99%.

Hasil Pileg di Kota Magelang dapat digambarkan melalui adanya perolehan kursi bagi para kandidat legislatif berdasarkan suara yang telah diperoleh dalam Pileg. Jumlah keseluruhan Kursi di Kota Magelang dari tiap periode Pileg tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 25 kursi. Perolehan kursi Parpol pada pileg Kota Magelang dapat diperinci sebagai berikut,

Tabel 2.3
Hasil Perolehan Kursi Parpol Pada Pileg Kota Magelang Periode 2004-2019

Periode	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
2004	Partai Demokrat	3
	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
	PAN	3
	PKB	1
	PKS	2
	PDI Perjuangan	7
	Partai Damai Sejahtera	2
	Partai Golkar	5
	Partai Persatuan Pembangunan	1
2009	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
	PKS	2
	PAN	3
	Partai Kebangkitan Bangsa	2
	Partai Golkar	3
	Partai Persatuan Pembangunan	1
	Partai Damai Sejahtera	1
	PDI Perjuangan	5
	Partai Demokrat	7
2014	Partai Nasdem	1
	PKB	2
	PKS	3
	PDI Perjuangan	7
	Partai Golkar	4
	Partai Gerindra	2
	Partai Demokrat	3
	PAN	1
	Partai Hanura	2
2019	PKB	3
	Partai Gerindra	1
	PDI Perjuangan	9
	Partai Golkar	3
	PKS	3
	Partai Persatuan Indonesia	1
	Partai Hanura	2
	Partai Demokrat	3

Sumber : Diolah Peneliti dari KPU Kota Magelang

Tabel diatas menunjukkan perolehan Kursi parpol pada periode Pileg 2004 sampai dengan 2019 di Kota Magelang. Jumlah kursi terbanyak dalam Pileg periode tersebut sebesar 9 kursi yang diperoleh PDI Perjuangan pada Pileg 2019. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa partai PDI Perjuangan menjadi Parpol yang mendominasi kursi pada Pileg Kota Magelang.

Pemilu Presiden di Indonesia secara langsung telah digelar sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2004 hingga tahun 2019. Kehadiran dan penggunaan hak memilih Pemilu Presiden di kota magelang dapat dilihat sebagai berikut,

Tabel 2.4

Partisipasi Pemilu Presiden Kota Magelang Periode 2004-2019

No	Jenis Pemilu	Partisipasi Pemilihan (%)				
		2004 Put. I	2004 Put. II	2009	2014	2019
1	Pemilihan Presiden	83,84	83,23	72,57	79,2	86,9

Sumber : diolah Peneliti dari KPU Kota Magelang

Tabel diatas menunjukkan adanya fluktuasi partisipasi atau kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pemilu Presiden di Kota Magelang Periode 2004-2019. Persentase tertinggi kehadiran dan penggunaan hak memilih pada pemilu tersebut berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 86,9% sedangkan persentase terendah berada pada tahun 2009 sebesar 72,57%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih di kota Magelang tergolong tinggi.

Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres di Kota Magelang secara keseluruhan dapat dirangkum dari segi kehadiran dan penggunaan hak memilih mengalami fluktuasi. Persentase kehadiran terbesar terjadi pada Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Pada tahun tersebut, Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari yang sama. Persentase kehadiran terendah terjadi pada Pileg 2009 yaitu sebesar 70,99%. Selain itu, Partai politik yang mendominasi perolehan kursi terbanyak di Kota Magelang pada Pileg Periode 2004-2019 yaitu Partai PDI Perjuangan.

b. Pilkada

Pilkada yang dilaksanakan di kota magelang mempunyai dua jenis yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub). Keduanya dilakukan secara langsung dalam arti dipilih oleh rakyat. Pilwalkot Magelang telah dilakukan sejak tahun 2005. Kehadiran dan penggunaan hak memilih menjadi sangat menentukan bagi keberlangsungan demokrasi di Kota Magelang. Kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 2.5
Partisipasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang
Periode 2005-2020

No	Jenis Pemilu	Partisipasi Pemilihan (%)			
		2005	2010	2015	2020
1	Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Magelang	77,59	71,78	75,23	77,9

Sumber : diolah Peneliti dari KPU Kota Magelang

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Magelang mengalami tren naik terutama pada 3 (tiga) periode terakhir. Pada Pilwalkot tahun 2020 kehadiran dan penggunaan hak memilih di kota magelang merupakan angka tertinggi dibandingkan periode Pilwalkot sebelumnya.

Tren kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya pada Pilwalkot Magelang.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah di Kota Magelang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hasil dari Pilgub menjadi tolok ukur kesadaran masyarakat kota Magelang dalam menggunakan hak pilihnya. Hasil kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam Pilgub Jawa Tengah pada Kota Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 2.6
Partisipasi Pilkada Gubernur Jawa Tengah Pada Kota Magelang
Periode 2008-2018

No	Jenis Pemilu	Partisipasi Pemilihan (%)		
		2008	2013	2018
1	Pilkada Gubernur Jawa Tengah	68,79	66,7	76,1

Sumber : diolah Peneliti dari KPU Kota Magelang

Tabel 2.6 dapat dijabarkan bahwa tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2013 menjadi paling rendah yaitu sebesar 66,7%. Pada tahun 2018 tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih merupakan yang tertinggi daripada periode-periode sebelumnya.

Pada Pilwalkot Magelang mempunyai rata-rata tingkat kehadiran yang lebih tinggi. Tingkat Kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Magelang secara konsisten mengalami kenaikan. Disamping itu, tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilgub menunjukkan angka yang masih rendah jika dibandingkan dengan hasil kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Magelang. Namun, hasil dari Pilkada di Kota Magelang jika dilihat dari tingkat

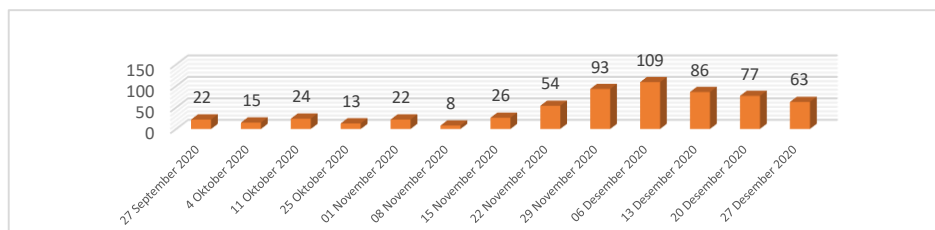
kehadiran dan penggunaan hak memilih keduanya memiliki kesamaan yaitu menghasilkan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

2.1.4 Kondisi Covid-19 Kota Magelang

Kasus Covid-19 di Kota Magelang mulai aktif sejak ditemukannya kasus pertama pada tanggal 11 Maret 2020. Sejak saat itu Kasus Covid-19 di Kota Magelang semakin bertambah. Kota Magelang merupakan salah satu kota yang terdapat kasus Covid-19 cukup tinggi. Perkembangan Kasus Positif Covid-19 dapat dilihat dalam grafik berikut,

Grafik 2.1

Perkembangan Kasus Positif Covid-19 di Kota Magelang Per September –Desember 2020



Sumber : Diolah Peneliti dari Website Satgas Covid-19 Kota Magelang

Grafik diatas menunjukkan perkembangan dari penambahan kasus Covid-19 di Kota Magelang. Grafik tersebut menunjukkan kasus Covid-19 yang terus meningkat. Peningkatan kasus Covid-19 menjadikan Kota Magelang berstatus sebagai zona merah Covid-19.

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 di Kota magelang yaitu dengan menyediakan adanya fasilitas kesehatan yang berupa rumah sakit rujukan Covid-19 pada RSUD Tidar Kota Magelang, RST Dr. Soedjono dan RSJ Prof. Dr.

Soerojo. Penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial juga dihimbau kepada masyarakat Kota Magelang. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut dilakukan guna menekan adanya kasus Covid-19 di Kota Magelang.

2.2 Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang menyandang status kota di Jawa Tengah. Kota Surakarta dapat disebut juga sebagai Solo atau Sala, selain itu kota Surakarta juga mempunyai berbagai julukan yaitu Kota Pelajar, Kota Batik dan Kota Budaya. Gambaran umum Kota Surakarta terdiri dari Kondisi Geografis dan Demografi, Kondisi Sosial-Budaya, Kondisi Sosial Politik dan Kondisi Covid-19 serta gambaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut,

2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Surakarta

a. Kondisi Geografis

Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah Kota yang berada pada daerah administratif Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Wilayah Kota Surakarta terletak pada $110^{\circ}45'15''$ - $110^{\circ}45'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}36'00''$ - $7^{\circ}56'00''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar $44,04 \text{ Km}^2$. Kota Surakarta memiliki 5 (lima) wilayah tercantum dalam tabel berikut,

Tabel 2.7**Wilayah Administratif Kota Surakarta**

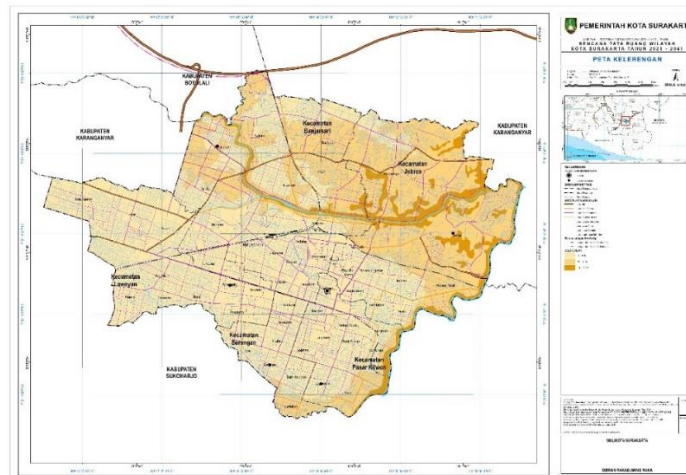
No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Kelurahan
1	Laweyan	8,64	11	Pajang, Laweyan, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, Sondakan, Kerten, Jajar, Karangasem.
2	Serengan	3,19	7	Joyotakan, Danukusuman, Serengan, Tipes, Kratonan, Jayengan, Kemlayan.
3	Pasar Kliwon	4,82	10	Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon, Gajahan, Baluwarti, Kampung Baru, Kedung Lumbu, Sangkrah, Kauman, Mojo.
4	Jebres	12,58	11	Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Sudiroprajan, Gandekan, Sewu, Pucangsawit, Jagalan, Purwodiningratan, Tegalharjo, Jebres, Mojosongo.
5	Banjarsari	14,81	15	Kadipiro, Nusukan, Gilingan, Setabelan, Kestalan, Keprabon, Timuran, Ketelan, Punggawan, Mangkubumen, Manahan, Sumber, Banyuanyar, Banjarsari, Joglo.

Sumber : Diolah Peneliti dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.

Dari tabel 2.3 menjelaskan persebaran kecamatan di Kota Surakarta beserta luas wilayah dan kelurahan yang ada pada setiap kecamatan. Selain itu, dari tabel tersebut diperoleh keterangan berupa wilayah kecamatan di Kota Surakarta yang terluas yaitu Kecamatan Banjarsari sedangkan wilayah kecamatan terkecil yaitu pada kecamatan Serengan.

Kota Surakarta menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah yang mempunyai letak yang strategis dalam jaringan kota-kota besar yang dapat disebut dengan jalur Joglosemar atau jalur Kota Yogyakarta, Kota Surakarta (Solo) dan Kota Semarang. Letak wilayah Kota Surakarta dapat dilihat dalam gambar berikut,

Gambar 2.3
Peta Kota Surakarta



Sumber : Bappeda Kota Surakarta

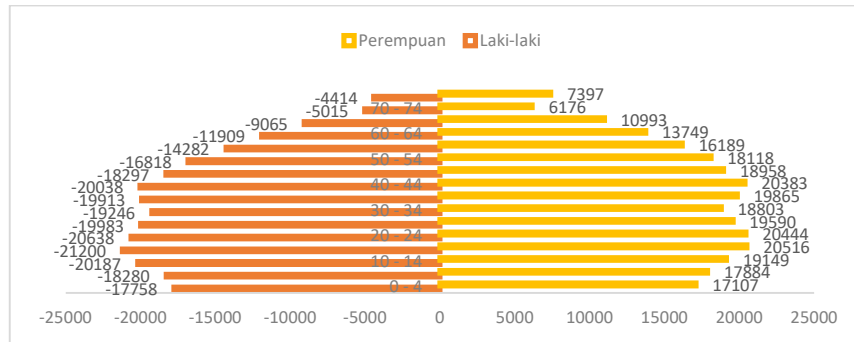
Gambar 2.3 menjelaskan batas-batas wilayah kota Surakarta diantaranya pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali serta batas sebelah selatan yaitu Kabupaten Sukoharjo. Batas wilayah Kota Surakarta sebelah timur yaitu Kabupaten Karanganyar, sedangkan batas sebelah barat yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

Kota Surakarta memiliki rata-rata suhu tertinggi yang terjadi pada bulan September dengan suhu 28,2°C. Curah hujan tertinggi di Kota Surakarta terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 275,3 mm hal tersebut disebutkan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta pada Surakarta dalam angka tahun 2021. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta merupakan wilayah yang mempunyai letak geografis yang strategis dan menjadi penghubung bagi daerah-daerah sekitarnya.

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan Survei Penduduk Tahun 2020, mencapai 522.364 Jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 265.321 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebesar 257.043 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut dapat diproyeksikan menurut kelompok umur sebagai berikut,

Gambar 2.4
Proyeksi Penduduk Per Kelompok Umur di Kota Surakarta Tahun 2020



Sumber : Diolah peneliti dari Surakarta Dalam angka 2021

Berdasarkan proyeksi penduduk di atas dapat dijelaskan bahwa komposisi penduduk di Kota Surakarta berupa Piramida Penduduk ekspansif yang dapat dibuktikan dengan adanya jumlah penduduk usia muda yang lebih mendominasi komposisi usia penduduk di Kota Surakarta. Selain itu, komposisi penduduk perempuan di Kota Surakarta lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Kondisi ekonomi di Kota Surakarta juga didukung oleh posisi kota Surakarta sebagai pusat ekonomi bagi daerah-daerah di sekelilingnya. Sektor industri dan perdagangan menjadi sumber ekonomi Kota Surakarta. Fasilitas sektor perdagangan yang memadai menjadikan ekonomi kota Surakarta berkembang

dengan pesat. Terdapat beberapa pasar di kota Surakarta yang menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat dalam kota maupun masyarakat luar kota Surakarta, hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta diantaranya Pasar Gede, Pasar Klewer, Pasar Mebel, dan lain sebagainya.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai sebutan sebagai Kota Pelajar. Hal tersebut dikarenakan, terdapat kemudahan akses yang sangat pesat pada fasilitas pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan terdapat 225 Sekolah Dasar yang ada di Kota Surakarta dan terdapat 82 Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, di Kota Surakarta terdapat 41 Sekolah Menengah Atas dan terdapat 49 Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan demikian, akses wajib pendidikan selama 9 (sembilan) tahun bagi masyarakat Kota Surakarta dapat dijangkau dengan mudah.

Kota Surakarta juga merupakan salah satu kota yang menjadi pusat pendidikan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta tersedia di Kota Surakarta diantaranya, 1). Universitas Sebelas Maret; 2). Universitas Islam Batik Surakarta; 3). Institut Seni Indonesia; 4). Universitas Surakarta; 5). Universitas Slamet Riyadi; 6). Poltekkes kemenkes Surakarta; 7). dan lain sebagainya. Keberadaan perguruan tinggi di kota Surakarta mendorong masyarakat Surakarta dan sekitarnya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat kota Surakarta dan sekitarnya.

2.2.2 Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan wilayah kota yang memiliki latar belakang sosial-budaya yang heterogen. Komposisi masyarakat Kota Surakarta pada umumnya didominasi oleh masyarakat Jawa baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah Surakarta. Masyarakat Tionghoa juga termasuk dalam komposisi masyarakat kota Surakarta yang kemudian terbentuk kawasan pecinan yang terletak di Kelurahan Sudioprajan, Kecamatan Jebres. Komposisi Masyarakat Surakarta juga didukung oleh adanya masyarakat Arab yang pada umumnya bermukim di kawasan Pasar Kliwon.

Budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Kota Surakarta yaitu Kebudayaan Jawa. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Kota Surakarta yang merupakan wilayah dari Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Kedua Keraton tersebut meninggalkan banyak tradisi yang mencerminkan kebudayaan Jawa sebagai aset masyarakat kota Surakarta. Tradisi-tradisi keraton yang masih dilestarikan hingga saat ini diantaranya Grebeg Sudiro, Kirab malam satu suro, Sekaten dan lain sebagainya. Keberadaan kebudayaan Jawa beserta nilai-nilai historis didalamnya menjadikan kondisi sosial-budaya Surakarta yang kompleks dan beragam

2.2.3 Kondisi Sosial Politik Kota Surakarta

Kondisi sosial politik di Kota Surakarta dapat digambarkan dengan adanya proses-proses demokrasi yang ada di Kota Surakarta. Proses demokrasi yang ada di Kota Surakarta terdiri dari Pemilihan Umum (Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan umum yang telah diselenggarakan di Kota Surakarta terdiri dari

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, sedangkan Pilkada terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan walikota dan wakil walikota.

a. Pemilu

Pemilu Legislatif (Pileg) di Kota Surakarta jumlah keseluruhan Kursi di Kota Surakarta mengalami perubahan yang pada semulanya sebesar 40 kursi kemudian pada tahun 2014 menjadi 45 Kursi. Perolehan Kursi Parpol pada Pileg Kota Surakarta dapat diperinci sebagai berikut,

Tabel. 2.8
Hasil Perolehan Kursi Parpol Pada Pileg Kota Surakarta Periode
2004-2019

Periode	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Total Kursi
2004	Partai Persatuan Pembangunan	1	40
	Partai Demokrat	4	
	PAN	7	
	PKS	4	
	PDI Perjuangan	15	
	Partai Damai Sejahtera	4	
	Partai Golkar	5	
2009	Partai Hanura	2	40
	Partai Gerindra	2	
	PKS	4	
	PAN	4	
	Partai Golkar	4	
	Partai Damai Sejahtera	2	
	PDI Perjuangan	15	
	Partai Demokrat	7	
2014	PKS	5	45
	PDI Perjuangan	24	
	Partai Golkar	4	
	Partai Gerindra	3	
	Partai Demokrat	3	
	PAN	4	
	Partai Persatuan Pembangunan	1	
	Partai Hanura	1	
2019	Partai Gerindra	3	45
	PDI Perjuangan	30	
	Partai Golkar	3	
	PKS	5	
	Partai Solidaritas Indonesia	1	
	PAN	3	

Sumber : Diolah Peneliti dari KPU Kota Surakarta

Tabel 2.8 menunjukkan perolehan Kursi parpol pada periode Pileg 2004 sampai dengan 2019 di Kota Surakarta. Jumlah kursi terbanyak dalam Pileg periode

tersebut sebesar 30 kursi yang diperoleh PDI Perjuangan pada Pileg 2019. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa partai PDI Perjuangan menjadi Parpol yang mendominasi kursi pada Pileg Kota Surakarta.

Pemilu Presiden di Indonesia secara langsung telah digelar sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2004 hingga tahun 2019. Kehadiran dan penggunaan hak memilih Pemilu Presiden di Kota Surakarta dapat dilihat sebagai berikut,

Tabel 2.9
Partisipasi Pemilu Presiden Kota Surakarta Periode 2004-2019

No	Jenis Pemilu	Partisipasi Pemilhan (%)				
		2004 Put. I	2004 Put. II	2009	2014	2019
1	Pemilihan Presiden	78,2	76	76,26	81,23	85

Sumber : diolah Peneliti dari KPU Kota Surakarta

Tabel diatas menunjukkan adanya persentase tertinggi kehadiran dan penggunaan hak memilih pada pemilu tersebut berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 85% sedangkan persentase terendah berada pada tahun 2004 sebesar 76 %. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih di Kota Surakarta tergolong tinggi.

Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres di Kota Surakarta secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan dari segi kehadiran dan penggunaan hak memilih mengalami fluktuasi. Persentase kehadiran terbesar terjadi pada Pileg dan Pilpres tahun 2019. Pada tahun tersebut, Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari yang sama. Persentase kehadiran terendah terjadi pada Pilpres 2004 putaran kedua yaitu sebesar 76%. Selain itu, Partai politik yang

mendominasi perolehan kursi terbanyak di Kota Surakarta pada Pileg Periode 2004-2019 yaitu Partai PDI Perjuangan.

b. Pilkada

Pilkada yang dilaksanakan di Kota Surakarta mempunyai dua jenis yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub). Keduanya dilakukan secara langsung dalam arti dipilih oleh rakyat sejak tahun 2005. Kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 2.10
Partisipasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
Periode 2005-2020

No	Jenis Pemilu	Partisipasi Pemilihan (%)			
		2005	2010	2015	2020
1	Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Surakarta	75,93	71,55	73,04	72,52

Sumber : diolah Peneliti dari KPU Kota Surakarta

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Surakarta mengalami fluktuasi. Pada Pilwalkot tahun 2005 kehadiran dan penggunaan hak memilih di Kota Surakarta merupakan angka tertinggi dibandingkan Pilwalkot periode lainnya. Pada Pilwalkot 2010 jumlah kehadiran dan penggunaan hak memilih merupakan angka terendah.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah di Kota Surakarta dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hasil dari Pilgub menjadi tolok ukur kesadaran masyarakat Kota Surakarta dalam menggunakan hak pilihnya. Hasil

kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam Pilgub Jawa Tengah pada Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 2.11
Partisipasi Pilkada Gubernur Jawa Tengah Pada Kota Surakarta
Periode 2008-2018

No	Jenis Pemilu	Partisipasi Pemilihan (%)		
		2008	2013	2018
1	Pilkada Gubernur Jawa Tengah	61,88	64,30	76,72

Sumber : diolah Peneliti dari KPU Kota Surakarta

Tabel 2.11 dapat dijabarkan bahwa tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2008 menjadi paling rendah yaitu sebesar 61,88%. Pada tahun 2018 tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih merupakan yang tertinggi daripada periode-periode sebelumnya.

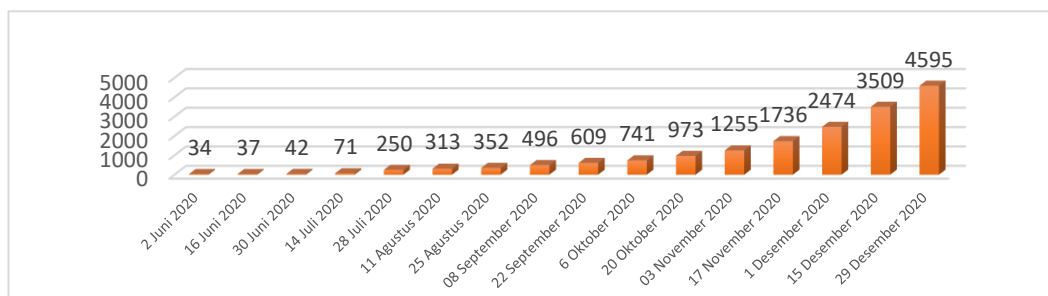
Pada Pilwalkot Surakarta mempunyai rata-rata tingkat kehadiran yang lebih tinggi. Tingkat Kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Surakarta secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Disamping itu, tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilgub menunjukkan angka yang masih rendah jika dibandingkan dengan hasil kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Surakarta. Namun, hasil dari Pilkada di Kota Surakarta jika dilihat dari tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih keduanya memiliki kesamaan yaitu menghasilkan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

2.2.4 Kondisi Covid-19 Kota Surakarta

Kasus Covid-19 di Kota Surakarta mulai aktif sejak ditemukannya kasus pertama pada tanggal 11 Maret 2011. Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang pertama kali ditemukan kasus Covid-19. Adanya kasus tersebut menjadikan Pemerintah mengambil langkah untuk mengambil status kejadian luar biasa (KLB). Kasus Covid-19 pertama di Kota Surakarta berasal dari kluster Seminar di Bogor. Sejak saat itu Kasus Covid-19 di Kota Surakarta semakin bertambah. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut,

Grafik 2.2

Perkembangan Kasus Positif Covid-19 di Kota Surakarta Tahun 2020



Sumber : Diolah Peneliti dari Website Satgas Covid-19 Kota Surakarta.

Grafik diatas menunjukkan perkembangan jumlah konfirmasi kasus Covid-19 di Kota Surakarta. Grafik tersebut menunjukkan jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat. Peningkatan kasus Covid-19 menjadikan Kota Surakarta berstatus sebagai zona merah Covid-19.

Pemerintah Kota Surakarta mengambil beberapa langkah dalam rangka menanggulangi Pandemi Covid-19. *Pertama*, Penerapan protokol kesehatan yang masif pada seluruh masyarakat Kota Surakarta. *Kedua*, Pemerintah Kota Surakarta

menyediakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit rujukan untuk menangani Covid-19. Rumah sakit yang menjadi rujukan dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 2.12

Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Kota Surakarta

No	Nama Rumah Sakit
1	RSUD Dr Moewardi
2	RST Slamet Riyadi
3	RSUD Kota Surakarta
4	RSUD Bung Karno
5	RS Dr. Oen Surakarta
6	RS Brayat Minulyo
7	RS Panti Waluyo
8	RS Kasih Ibu
9	RS PKU Muhammadiyah Surakarta
10	RSI Kustati
11	RS Triharsi
12	RS Hermina

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2022

Tabel tersebut menunjukkan terdapat 12 (Dua belas) rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 Kota Surakarta. Keberadaan Rumah sakit tersebut tidak hanya menangani perawatan Covid-19 di wilayah kota Surakarta tetapi juga menjadi Rumah sakit rujukan bagi kabupaten/kota di sekitarnya. *Ketiga*, penyediaan fasilitas karantina bagi masyarakat yang datang dari luar wilayah Kota Surakarta . Fasilitas

karantina ini bertempat di Solo Techno Park. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut dilakukan pemerintah Kota Surakarta guna menekan angka Covid-19 di Kota Surakarta.